Jurnal Manajemen Pelayanan Publik

**Keterlibatan Komunitas (*Community Engagement*)
Dalam Pembangunan di Tingkat Desa**

**Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dalam Menghasilkan Undang-Undang
Pada Tahun Sidang 2016-2017**

**Analisis Kualitas Pelayanan Rawat Jalan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai**

**Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga
dan Rukun Kampung (RT/RW) di Kelurahan
Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru**

**Desentralisasi Pendidikan (Studi Efektifitas
Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan
Pendidikan Sekolah Menengah Umum
Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)**

Keterlibatan Komunitas (*Community Engagement*) Dalam Pembangunan di Tingkat Desa

Kristian Widya Wicaksono¹

ABSTRAK

Pendekatan *top-down* cenderung merepresentasikan kelompok mayoritas yang memiliki pengaruh, kapasitas dan kapabilitas yang lebih kuat. Hal ini menyebabkan aktor lainnya menjadi kurang didengar aspirasinya dan meminggirkan kelompok kecil ini dari komunitas mereka sendiri sehingga menjadi kelompok minoritas. Situasi tersebut memicu munculnya gerakan pembangunan alternatif sebagai sebuah kritik terhadap pola pembangunan yang *top-down*. Gerakan pembangunan tersebut menekankan pada keterlibatan aktif yang mendalam dari komunitas pada proses pembangunan dengan menempatkan komunitas sebagai pusat tujuan pembangunan. Semenjak itu, sejumlah konsep pembangunan yang berpusat pada komunitas mulai bermunculan seperti partisipasi, pemberdayaan komunitas, pengembangan komunitas, penyusunan anggaran partisipatoris dan lain sebagainya. Tulisan ini berupaya untuk memberikan kontribusi gagasan mengenai keterlibatan komunitas di dalam pembangunan komunitas pada tingkat desa dan bagaimana kepada desa mengembangkan komitmen komunitasnya dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan desain eksplorasi yang bertujuan mengeksplorasi makna dari keterlibatan komunitas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara heuristik. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas akan membuat keputusan yang dihasilkan diterima lebih luas oleh berbagai kalangan yang ada di dalam komunitas tersebut. Dengan demikian tulisan ini sampai pada kesimpulan pada keterlibatan komunitas membuat kerja dalam komunitas menjadi lebih bertujuan, terintegrasi, sistematis dan tertata lebih rapi.

Kata Kunci: proses *bottom-up*; pembangunan komunitas; keterlibatan komunitas

ABSTRACT

Top-down approaches are more likely to represent the interests of elite decision-makers as major actors who have a stronger influence, capacities and capabilities. This causes other actors to be less heard about their aspirations and marginalizes these small groups within the community into a minority. The situation encouraged the emergence of development movement as a form of criticism of the top-down pattern of development. This development movement emphasizes the deep active involvement of the community in the development process by placing the community as the main center of development purpose. Since then, various concepts have emerged about development such as participation, community empowerment, capacity building, participatory budgeting, and so on. As time changes, the concepts of participation begin to change toward a new concept called engagement. This paper tries to contribute ideas

¹ Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan dan Mahasiswa S3 Departemen Ilmu Politik Universitas Tunghai, Taiwans. Email : kristian.widya@unpar.ac.id

about community engagement in community development at village level and how the head of village community leader builds community commitment in carrying out development in accordance with their needs and appropriately addressing their problems. This research utilizes exploratory design aimed at exploring the meaning of community engagement. The data used is secondary data which is analyzed heuristically. The results of this study indicate that community engagement will make decisions made more widely accepted by various actors in the community. So this essay came to the conclusion that community engagement makes work within the community more purposeful, integrated, systematic and neatly organized.

Keywords: *bottom-up process; community development; community*

PENDAHULUAN

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan pandangan alternatif dari pendekatan yang menekankan pada inisiatif pemerintah. Friedman menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan alternatif dari pola pembangunan yang selama ini menekankan pendekatan yang bersifat *top-down* (Friedmann, 1992).

Pendekatan pembangunan secara *top-down* dianggap telah gagal dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan pendekatan *top-down* lebih merepresentasikan pandangan elit pengambil keputusan dalam menentukan bentuk pembangunan yang akan dilakukan. Kenyataannya, pola *top-down* semacam ini justru menciptakan permasalahan yang baru di tengah masyarakat karena hasil pembangunan tidak mampu secara efektif mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat (Friedmann, 1992).

Oleh karenanya, gerakan alternatif pembangunan muncul sebagai bentuk kritik pola pembangunan yang selama ini bersifat *top-down*. Gerakan pembangunan ini menekankan pada pelibatan masyarakat secara aktif pembangunan dengan menempatkan komunitas masyarakat sebagai penentu utama kebijakan pembangunan (Soto, 1989). Konsep-konsep pembangunan seperti: partisipasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas, penganggaran partisipatif dan lain sebagainya mulai menjadi primadona di kalangan penggiat pembangunan (CREW Regeneration Wales Adfywio Cymru, 2014).

Seiring dengan perkembangan waktu, konsep partisipasi (*participation*) mulai berubah ke arah keterlibatan (*engagement*). Para penggiat pembangunan semakin sadar bahwa keterbatasan sumberdaya yang dapat disediakan untuk melaksanakan pembangunan dapat diatasi dengan metode membuka peluang yang luas kepada berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat secara nyata dalam rangkaian proses pembangunan (Shaw & Crowther, 2017).

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini mencoba untuk memberikan sumbangan pemikiran praktis mengenai *community engagement* dalam proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran praktis ini dapat dipergunakan oleh pemimpin komunitas di berbagai lapisan dalam membangun komitmen bersama dengan anggota komunitas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan yang tengah dihadapi oleh komunitas tersebut.

KAJIAN TEORI DAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Konsep Dasar Keterlibatan Komunitas (*Community Engagemnet*)

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran praktis sehingga konsep dasar *community engagement* pada tulisan ini lebih dimaksudkan sebatas sebagai bentuk pengenalan kepada pembaca. Penulis

mecoba menggunakan padanan kata Keterlibatan Komunitas untuk menjelaskan *Community engagement*. Adapun alasan penulis adalah kata keterlibatan memperlihatkan intensitas yang lebih mendalam dibandingkan kata lain dalam konteks partisipasi pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat melihat bahwa ada upaya lanjutan untuk menjelaskan bagaimana individu dan kelompok dalam komunitas terlibat lebih serius di dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan bersama. Kata terlibat dapat dimaknai sebagai sumbangsih dalam bentuk tindakan dan bukan hanya sekedar hadir di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Artinya individu dan kelompok dalam komunitas melakukan tindakan aktif untuk menunjukkan bahwa mereka menjadi

bagian pelaku dari pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Inilah yang dimaksudkan bahwa kata keterlibatan memiliki makna yang intensitasnya lebih tinggi dari kata partisipasi.

Konsep *community engagement* pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari akarnya yaitu model tangga partisipasi (*ladder of participation*) yang dikembangkan oleh Arnstein (1969). Model ini memperlihatkan delapan tahapan partisipasi masyarakat secara berjenjang dalam pembangunan. Delapan jenjang tersebut mengindikasikan tingkat intensitas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Untuk memberikan gambaran ilustratif dari model tersebut, maka kita dapat melihatnya dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Model Partisipasi Arnstein

Sumber: Arnstein (1969)

Pada model tersebut dapat dilihat bahwa Arnstein membagi partisipasi dalam beberapa

delapan tingkatan untuk menunjukkan kedalaman level partisipasi masyarakat. Pada jenjang yang

paling bawah yaitu manipulasi diperlihatkan bahwa partisipasi sama sekali tidak terjadi. Level ini mendeskripsikan bahwa masyarakat sama sekali tidak diinformasikan mengenai keputusan pembangunan yang akan dilaksanakan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan tanpa mengetahui apa yang melandasi keputusan tersebut serta bagaimana manfaat yang dapat mereka terima jika mengikuti keputusan tersebut. Sebaliknya, pada level tertinggi yang diharapkan dalam partisipasi adalah pada zona *citizen power*. Pada level ini partisipasi masyarakat sangatlah tinggi yang dijelaskan sebagai bentuk bahwa masyarakatlah yang menjadi pengedali dan melakukan proses pengendalian pembuatan dan pelaksanaan keputusan di dalam pembangunan. Di

antara level yang paling bawah dan paling atas terdapat sejumlah jenjang yang menunjukkan peningkatan intensitas partisipasi seiring dengan meningkatnya tahapan dalam jenjang tersebut dalam arah menuju ke atas.

Model ini kemudian mulai berkembang dan dimodifikasi oleh para praktisi pembangunan. Sebuah organisasi internasional yang menaruh perhatian dalam hal pelibatan masyarakat dalam pembangunan kemudian mengembangkan sebuah model baru. Organisasi ini bernama *The International Association for Public Participation* (IAP2) yang berkedudukan di Australia. Model yang mereka kembangkan diberi nama spektrum partisipasi publik dan dapat dilihat ilustrasinya di dalam gambar berikut ini:

Gambar 2 The IAP2 Public Participation Spectrum

	INFORM	CONSULT	INVOLVE	COLLABORATE	EMPOWER
PUBLIC PARTICIPATION GOAL	To provide the public with balanced and objective information to assist them in understanding the problems, alternatives and/or solutions.	To obtain public feedback on analysis, alternatives and/or decision.	To work directly with the public throughout the process to ensure that public issues and concerns are consistently understood and considered.	To partner with the public in each aspect of the decision including the development of alternatives and the identification of the preferred solution.	To place final decision-making in the hands of the public.
PROMISE TO THE PUBLIC	We will keep you informed.	We will keep you informed, listen to and acknowledge concerns and provide feedback on how public input influenced the decision.	We will work with you to ensure that your concerns and issues are directly reflected in the alternatives developed and provide feedback on how public input influenced the decision.	We will look to you for direct advice and innovation in formulating solutions and incorporate your advice and recommendations into the decisions to the maximum extent possible.	We will implement what you decide.
EXAMPLE TOOLS	<ul style="list-style-type: none"> • Fact sheets • Websites • Open houses 	<ul style="list-style-type: none"> • Public comment • Focus groups • Surveys • Public meetings 	<ul style="list-style-type: none"> • Workshops • Deliberate polling 	<ul style="list-style-type: none"> • Citizen Advisory committees • Consensus-building • Participatory decision-making 	<ul style="list-style-type: none"> • Citizen juries • Ballots • Delegated decisions

Sumber: Australian Government (2016)

Model ini terdiri dari lima spektrum partisipasi publik dimulai dari tingkat *inform* hingga pada level *empower*. Dalam tahapan terendah yakni *inform* dijelaskan bahwa pengambil keputusan

hanya sebatas memberikan informasi yang objektif dan berimbang bagi komunitas dengan tujuan untuk membantu agar komunitas dapat memahami masalah, alternatif yang dikembangkan dan/atau

solusi-solusi yang dimunculkan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan level tertinggi adalah *empower*. Pada tahap ini, proses pengambilan keputusan akhir diserahkan kepada komunitas untuk menghasilkan kebijakan penyelesaian masalah. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa komunitas ditempatkan sebagai pengambil keputusan utama yang menentukan arah, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh komunitas tersebut.

Dalam perkembangannya, mulailah diperkenalkan istilah *community engagement* atau sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam tulisan ini dipadankan dengan istilah keterlibatan masyarakat. Dalam modul *World Health Organization* (WHO) (2012), dijelaskan bahwa *community engagement* merupakan proses yang mendatangkan manfaat baik bagi individu maupun sekelompok orang guna membangun hubungan jangka panjang dengan visi bersama untuk kepentingan bersama di dalam komunitas tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa di dalam keterlibatan masyarakat terdapat upaya untuk mengontruksi hubungan diantara sesama pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang panjang dengan mengembangkan visi bersama untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua anggota baik secara individual maupun kelompok di dalam sebuah komunitas.

Dalam tulisan yang berbeda yaitu laporan yang disusun oleh sebuah lembaga kesehatan bernama *Center for Disease Control and Prevention* (2011) dipaparkan bahwa *community engagement* merupakan proses kerja kolaboratif dari sekelompok orang yang berafiliasi karena wilayah geografi, kesamaan kepentingan atau kesamaan situasi untuk mengatasi isu-isu yang berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka bersama. Definisi ini mengakar pada penegasan konsep komunitas baik yang terwadahi dari berbagai aspek seperti geografis atau karena kesamaan kepentingan atau situasi yang dihadapi. Definisi ini juga menekankan pada pentingnya upaya kolaboratif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah yang

mereka hadapi bersama.

Dalam tulisan yang berbeda, *community engagement* dipahami sebagai sebuah proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan yang diikuti dengan mengidentifikasi prioritas dan berbagai peluang serta membuat keputusan dan mewujudkannya (Smith, Sarah, Marina, & Metcalfe, 2014). Pengertian ini memfokuskan pada aspek proses pembelajaran dan bagaimana secara reflektif proses pembelajaran tersebut dikembangkan sedemikian rupa melalui perencanaan yang kemudian diwujudkan untuk mendatangkan manfaat yang nyata bagi anggota komunitas baik secara individual maupun sebagai sebuah komunitas.

Dalam pandangan yang sama, *community engagement* dipahami sebagai proses sosial yang menekankan pada aspek kerjasama di tengah masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan melalui batas-batas disiplin pengetahuan dan memanfaatkan berbagai pengetahuan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar komunitas masyarakat tersebut (Lommerse, 2011). Definisi ini mengarahkan kita pada kerjasama di dalam sebuah komunitas dan mengoptimalisasi penggunaan pengetahuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat pula penegasan bahwa pengetahuan yang bersifat lintas disiplin menjadi titik tolak dalam kerangka pengembangan rencana intervensi dan aksi yang ditujukan untuk mengatasi masalah dan upaya untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat atau *community engagement* merupakan bentuk hubungan kerjasama yang dirancang untuk kepentingan panjang diantara anggota sebuah komunitas yang memiliki visi bersama untuk mengatasi masalah dan mengupayakan untuk mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama. Maka dari itu, tujuan dari *community engagement* adalah proses pembelajaran untuk membangun kepercayaan, mengembangkan prioritas, mendapatkan sumberdaya dan mengembangkan jaringan, membangun saluran komunikasi yang efektif, dan mendapatkan hasil-hasil yang

bermanfaat melalui proses kolaborasi yang menyeluruh dan dilakukan secara berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun dengan menggunakan desain eksplorasi. Gabrielian menjelaskan bahwa maksud dari desain eksplorasi adalah: “*the main purpose of exploratory design is to extend valid understanding of a concept, draw a process, or yield beginning theories that clarify the examined phenomenon*” (Gabrielian, 1999). Dengan desain ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang tepat tentang *community engagement*.

Informasi yang ditampilkan di dalam tulisan ini merupakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara heuristik berdasarkan apa yang terungkap secara implisit pada data dan informasi dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan *Community Engagement* dalam Pembangunan

Dalam modul yang dikembangkan oleh WHO (2012) dijelaskan bahwa terdapat lima buah tindakan yang dilakukan oleh para praktisi untuk mewujudkan *community engagement* yaitu:

1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai arah kebijakan pemerintah.
2. Berkonsultasi dengan masyarakat sebagai bagian dari proses untuk mengembangkan kebijakan pemerintah atau membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat
3. Melibatkan masyarakat melalui sejumlah mekanisme untuk memastikan bahwa isu-isu dan kepedulian-kepedulian dapat dipahami dan dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan
4. Berkolaborasi dengan masyarakat dengan cara mengembangkan kemitraan untuk memformulasikan pilihan-pilihan dan menyediakan rekomendasi-rekomendasi

5. Memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan serta mengelola perubahan.

Pada poin yang pertama dijelaskan mengenai penyampaian informasi tentang arah kebijakan pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan. Pada tahap ini masyarakat diperlakukan sebagai objek sasaran untuk mendapatkan informasi. Nampak bahwa kebijakan pemerintah merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh masyarakat.

Kemudian, poin kedua menjelaskan bahwa masyarakat diposisikan sebagai mitra untuk mendiskusikan kebijakan pemerintah. Dalam proses diskusi ini, masyarakat diberikang ruang untuk mengemukakan pandangan dan gagasan-gagasan mereka dalam pengembangan kebijakan pemerintah. Pada tahapan ini pula diharapkan adanya internalisasi kebijakan. Dalam terminologi yang lain sebenarnya hal ini dapat dimaknai sebagai advokasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Nancy bahwa advokasi kebijakan juga merupakan upaya mengedukasi masyarakat tentang apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang sebuah kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka panjang (Amidei, 2008).

Pada poin yang ketiga dijelaskan tentang pelibatan masyarakat dalam proses dialog yang lebih mendalam untuk benar-benar menginternalisasi isu dan kepedulian serta nilai-nilai yang melandasi sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya sekedar menjadi kelompok sasaran yang harus mematuhi kebijakan melainkan juga secara aktif menyadari alasan mengapa kebijakan tersebut penting dan mengajak kelompok yang lainnya juga untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan.

Berikutnya adalah poin keempat yang masuk dalam tahapan pengembangan kemitraan yang lebih sejajar dan berimbang. Hal ini memungkinkan dialog lanjutan yang menggali lebih jauh ekspektasi masyarakat dan membangun opsi-opsi kebijakan

yang baru bersama dengan masyarakat serta bersama-sama menganalisis opsi mana saja yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh komunitas tersebut.

Akhirnya poin kelima, yaitu sebuah situasi yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah lebih independen dan otonom untuk menentukan apa yang hendak mereka lakukan berdasarkan prakarsa dan buah pemikiran mereka sendiri. Hal ini tentunya menuntut sebuah kematangan dan

kedewasaan dalam membuat keputusan. Lebih lanjut hal ini pula perlu didukung dengan kemampuan untuk memperoleh dan mengolah data dan informasi yang diperoleh dan kemudian menghasilkan keputusan yang argumentatif untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan bersama.

Berikut ini adalah gambaran yang lebih operasional mengenai pengembangan kelima langkah dalam *community engagement* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya:

Tabel 1
Pengembangan 5 Langkah *Community Engagement*

INFORM	CONSULT	INVOLVE	COLLABORATE	SHARED LEADERSHIP
Some community Involvement	More community involvement	Better community involvement	Community involvement	Strong relationship
Provides community with information	Gets information or feedback from the community	Involves more participation with community on issues	Forms partnerships with community on each aspect of the project – from development to solution	Strong partnership structure is formed
Optimally established communication channels and channels for outreach	Develops connections	Visibility of partnership established with increased cooperation	Partnership building, trust building	Broader health outcomes affecting broader community. Strong bidirectional trust built

Sumber : WHO (*World Health Organization*, 2012)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam membangun *community engagement* adalah menyediakan informasi bagi masyarakat melalui proses pengembangan saluran komunikasi dengan masyarakat. Contohnya seperti praktek yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Majasari yakni dengan melakukan komunikasi yang intensif melalui forum tatap-muka dengan warga yang rutin dilakukan di Kantor Desa Majasari. Melalui forum tersebut, masyarakat diberitahu mengenai rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa (Prasetyo, Rachmawati, Guna- wan, Herwanto, & Wicaksono, 2017).

Langkah kedua adalah mendapatkan informasi dan masukan-masukan dari masyarakat yang dilakukan dengan mengembangkan hubungan dengan masyarakat. Pada tahap ini dilakukan berbagai upaya untuk mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat baik melalui proses dialog tatap muka maupun melalui media berbasis teknologi informasi yang memungkinkan bagi informasi tersebut ditransmisikan kepada pengambil keputusan. Misalnya, Pemerintah Desa Majasari yang mengembangkan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan group *Whatsapp* untuk dijadikan sarana saluran komunikasi menerima masukan-masukan dan informasi-informasi dari

masyarakat (Prasetyo, Rachmawati, Gunawan, Herwanto, & Wicaksono, 2017).

Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat dengan isu-isu spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, Pemerintah Desa Majasari melibatkan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan peternakan sapi. Awalnya dibentuk kelompok-kelompok petani yang kemudian diberi modal berupa ternak sapi. Kemudian pengelolaan ternak tersebut dilakukan secara berkelompok dan didampingi secara berkesinambungan oleh Pemerintah Desa (Prasetyo, Rachmawati, Gunawan, Herwanto, & Wicaksono, 2017). Hal yang sama dilakukan pula oleh Pemerintah Desa Lalangsembawa untuk mengatasi permasalahan banjir. Masyarakat dilibatkan untuk menata ulang pemukiman di Desa Lalangsembawa sehingga dapat mengatasi masalah penyakit yang muncul pasca terjadinya banjir di desa tersebut (Prasetyo, Rachmawati, Gunawan, Herwanto, & Wicaksono, 2017).

Langkah berikutnya yakni langkah keempat yaitu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan serta mengembangkan solusi program atau kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Perlu untuk disadari bahwa upaya untuk mengatasi masalah tidak dapat dilakukan oleh beberapa aktor saja. Dibutuhkan keterlibatan lebih banyak aktor untuk menyelesaikan variasi problem yang merintanginya masyarakat untuk mencapai tujuan atau ekspektasi bersamanya. Oleh karenanya, membuat forum-forum untuk mendiskusikan masalah dan merancang bersama program/kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut merupakan langkah yang tepat.

Pada tahapan terakhir adalah berwujudnya hubungan yang erat antar pemangku kepentingan di dalam komunitas masyarakat. Apabila sudah berada di level ini maka proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan akan lebih lancar sebab seluruh pemangku kepentingan sudah saling percaya satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan proses kerjasama untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama.

Menurut Leiden (2002) terdapat sejumlah

kondisi yang mesti terjadi terlebih dahulu sebelum *engagement* dapat terjadi. Kondisi-kondisi tersebut diantaranya:

1. Tujuan yang jelas dan didukung oleh seluruh elemen komunitas. Poin pertama ini adalah adanya tujuan bersama yang mengikat bagi anggota masyarakat. Hal ini memungkinkan komunitas tersebut bergerak secara dinamis dan sinergis untuk mencapai harapan dan tujuan bersama.
2. Kemauan yang kuat untuk berkolaborasi. Kedua adalah kemauan dari berbagai pemangku kepentingan untuk bekerjasama guna mewujudkan tujuan bersama. Jika tujuan yang ditetapkan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen dalam komunitas maka kemudian mereka akan melangkah dengan lebih mudah untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Komitmen untuk memberikan kontribusi. Ketiga, adanya komitmen dari para pemangku kepentingan untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya yang dilakukan guna mewujudkan tujuan bersama. Seluruh elemen harus melakukan perannya masing-masing dengan cara menunjukkan upaya yang nyata baik dalam bentuk dukungan sumberdaya maupun kerja-kerja nyata lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Keempat adalah partisipasi dari orang-orang yang tepat. Terkadang yang kita butuhkan untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama dalam suatu komunitas bukanlah orang-orang yang terbaik tetapi orang-orang yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan mereka guna mewujudkan tujuan bersama. Keahlian memang dibutuhkan tetapi ketika keahlian tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan maka keahlian tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan.
5. Kelima adalah proses yang terbuka dan kredibel. Kredibilitas dan keterbukaan akan berimplikasi pada terbangunnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan bahwa perubahan yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan

bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka akses terhadap semua tahapan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Hal ini memungkinkan komitmen dari seluruh elemen terbangun dengan lebih utuh.

6. Terakhir adalah keterlibatan dari para agen perubahan yang memiliki kredibilitas yang baik untuk mendukung agenda perubahan. Kebutuhan akan peran aktor yang memiliki arah dalam pelaksanaan perubahan menjadi penting. Perubahan tidak akan terjadi apabila tidak ada yang mewujudkan perubahan tersebut. Hal ini juga tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan kemampuan dari satu atau beberapa orang saja tetapi keterlibatan dari seluruh elemen khususnya mereka yang memiliki kredibilitas untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan menjadi sesuatu yang penting.

Faktor lainnya yang penting dalam *community engagement* adalah Kepemimpinan (Walker, 2014). Hampir di semua level pemerintah baik di level Pusat, Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) bahkan hingga ke tingkat Desa di Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah atau desa yang inovatif memiliki kepemimpinan yang berkualitas (Prasetyo, Rachmawati, Gunawan, Herwanto, & Wicaksono, 2017). Peran Kepala Daerah atau Kepala Desa sebagai motor penggerak perubahan di wilayah yang dipimpinnya merupakan faktor yang sangat krusial. Hal-hal penting yang perlu dilakukan oleh pemimpin masyarakat untuk menginisiasi perubahan diantaranya adalah:

1. Memberikan keyakinan mengenai dampak positif yang bermanfaat atas visi bersama yang akan dicapai. Hal ini berhubungan dengan meyakinkan para pemangku kepentingan strategis di dalam sebuah komunitas mengenai mimpi tentang kondisi yang ideal di masa mendatang dan membangun komitmen mereka untuk terlibat dalam upaya mewujudkan visi tersebut.
2. Mendiskusikan dan mendefinisikan inisiatif yang akan dilakukan dan dampak potensialnya

di masa mendatang. Pada bagian ini dilakukan proses diskusi dan penentuan program yang akan dilakukan serta potensi dampaknya terhadap masyarakat. Pemimpin hendaklah membuka ruang dialog yang lebih serius dengan komunitasnya agar dapat membuka wawasan anggota komunitas mengenai kondisi ideal yang kelak akan dicapai melalui tindakan bersama yang akan dilaksanakan.

3. Menetapkan kerangka nilai dasar filosofis dan tujuan dari *community engagement*. Pada proses ini yang dilakukan adalah menetapkan maksud dan tujuan dari *community engagement* dengan menjelaskan nilai dasar yang melandasi visi dan kesesuaiannya dengan keyakinan dan nilai-nilai yang selama ini mengikat komunitas tersebut sebagai sebuah identitas bersama.
4. Berikutnya yang dilakukan adalah mendefinisikan komunitas artinya aktor dan ruang lingkup komunitas yang akan terlibat. Tentunya hal ini penting agar pada tingkat operasionalisasi menjadi jelas segmen komunitas yang akan bekerja untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan dan rencana-rencana tindakan yang sudah disusun.
5. Pemimpin juga perlu mengetahui dan menghormati nilai-nilai dan karakteristik khusus yang ada di dalam masyarakat. Hal ini akan memperkuat legitimasi pemimpin di tengah komunitasnya sehingga mendapatkan dukungan yang nyata dari masyarakat atas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan pemimpin tersebut.
6. Proses selanjutnya adalah membangun hubungan dengan masyarakat, membangun kepercayaan, bekerja dengan kepemimpinan formal dan informal, mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat, mengidentifikasi agen-agen perubahan yang mendukung program yang dicanangkan, melakukan pertemuan dengan organisasi lokal dan mempelajari aset dan tantangan bagi komunitas masyarakat. Hal ini adalah proses operasional yang harus dilakukan oleh pemimpin secara jeli. Terkadang membangun mimpi itu mudah tetapi bagaimana mewujudkannya merupakan tantangan tersendiri. Keyakinan dan optimism harus

dibangun secara berkesinambungan untuk menjaga motivasi elemen yang terlibat agar dapat bekerja secara konsisten dan dalam jangka waktu yang panjang.

7. Hal terakhir yang perlu dilakukan oleh pemimpin sebagai inisiator perubahan adalah menemukan apa yang menjadi kepentingan bersama untuk dapat membangun *community engagement*. Hal ini tentunya tidaklah mudah. Akan tetapi, tanpa menegaskan kepentingan bersama yang akan menjadi capaian dalam komunitasnya maka pemimpin akan kehilangan momentum yang berharga dalam penggunaan pengaruhnya di tengah komunitas.

Proses *Community Engagement*

Proses *Community Engagement* secara praktis dapat dibagi ke dalam 4 tahap (Walker, 2014). Keempat tahap tersebut diantaranya adalah:

1. Mempersiapkan tahapan-tahapan perubahan. Pada bagian ini tentunya kita perlu menjelaskan setiap tahapan yang akan terjadi sebelum perubahan tersebut berwujud sebagai sebuah kondisi terminal yang akan dicapai di masa mendatang. Tahapan-tahapan ini hendaknya disusun secara sistematis melalui proses dialog yang melibatkan anggota komunitas sehingga setiap pencapaian dari satu tahap ke tahap lainnya menjadi terdefinisi dengan jelas.
2. Mengumpulkan fakta-fakta, bertukar pikiran diantara anggota komunitas dan menentukan solusi yang akan dilakukan. Hal ini melibatkan proses memprediksi tantangan dan hambatan yang akan hadir di masa mendatang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Kemudian menentukan langkah manuver untuk keluar dari potensi tantangan dan hambatan tersebut.
3. Membuat perencanaan dan melakukan peninjauan ulang terhadap perencanaan yang sudah disusun. Penting tentunya untuk membuat perencanaan dan melakukan penyesuaian serta pengembangan rencana untuk menghindari situasi stagnansi. Hal ini membutuhkan kejelian untuk membaca perkembangan situasi dalam pelaksanaan rencana.

4. Mengimplementasikan dan mengevaluasi program/kegiatan yang dilakukan. Tahap yang penting adalah melaksanakan rencana. Hal ini membutuhkan kepekaan terhadap setiap langkah dan perkembangan yang terjadi. Melakukan evaluasi dan merumuskan kembali rencana tindak lanjut secara berkelanjutan menjadi bagian selanjutnya yang harus dilakukan secara cermat dan penuh dengan perhitungan.

Dalam proses yang terjadi di dalam keempat fase operasional tersebut dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik terutama kemampuan untuk menjelaskan gagasan perubahan dan meyakinkan pihak lain mengenai gagasan perubahan tersebut. Kesabaran dan fleksibilitas juga dibutuhkan agar proses advokasi gagasan perubahan dapat berjalan secara efektif. Menularkan mimpi kepada komunitas dan menginspirasi mereka bahwa perubahan tersebut akan memberikan dampak yang positif merupakan pekerjaan yang membutuhkan proses.

Untuk dapat melakukan proses *engagement* dibutuhkan pula pengakuan dari komunitas masyarakat. Proses untuk mendapatkan pengakuan seperti ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang membutuhkan kemampuan untuk mempengaruhi tokoh-tokoh kunci di dalam komunitas masyarakat tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dielaborasi dalam tulisan ini, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi kesimpulan yang merefleksikan konseptualisasi Keterlibatan komunitas atau *Community engagement* yaitu:

1. *Community Engagement* atau keterlibatan komunitas merupakan model alternatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Dengan menekankan pada aspek pemanfaatan pengetahuan dan kerjasama yang dinamis dalam sebuah komunitas, konsep *community engagement* menjadi sebuah pendekatan yang cukup

operasional untuk membantu komunitas-komunitas di dalam ruang lingkup sosial yang lebih luas untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan proses berpikir dan mencerminkan harapan dari komunitas itu sendiri.

2. Proses pengambilan keputusan dalam keterlibatan masyarakat lebih terfokus pada aspek yang sifatnya *bottom-up* yang mengedepankan keterlibatan masyarakat secara lebih menyeluruh. Hal ini mendorong inisiatif masyarakat untuk terus berkembang dan lebih konsisten mewujudkan keinginan mereka secara independen dan berkesinambungan. Keterbatasan sumberdaya menyebabkan *community engagement* menjadi sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Oleh karenanya, kedepan pembangunan akan jauh lebih dapat diterima oleh masyarakat apabila mereka benar-benar *engage* di dalam prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasinya.

Terakhir adalah peran kepemimpinan dalam hal ini Kepala Desa untuk memberikan arah dalam pelibatan aktif masyarakat juga menjadi penting. Setidaknya pengembangan pengetahuan melalui pendekatan lintas disiplin dapat dibangun oleh pemimpin untuk memandu arah perubahan yang diharapkan pada level komunitas. Hal ini membuat kerja di dalam komunitas menjadi lebih bertujuan, terintegrasi, sistematis dan tertata dengan rapi. *Community engagement* yang ditinjau sebagai proses berkesinambungan membutuhkan hal ini agar kerja dalam komunitas memiliki visi yang jelas serta memiliki mesin yang dinamis dalam jangka waktu panjang. Kondisi tersebut akan menghindarkan pelibatan komunitas dari upaya yang sifatnya reaksioner dan temporal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidei, N. (2008). *Public Policy Advocacy: Five Steps, Five Strategies, Five Things to Remember*. Washington: Washington State Coalition Against Domestic Violence.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *JAIP*, 216-224.
- Australian Government. (2016). *Community Engagemnet and Development: Leading Practice Sustainable Development Program for The Mining Industry*. Canberra: Australian Government.
- Center for Disease Control and Prevention (CDC). (2011). *Principles of community engagement*. Atlanta, Georgia: Center for Disease Control and Prevention (CDC).
- CREW Regeneration Wales Adfywio Cymru. (2014). *A Guide to Effective Community Engagement*. Wales: CREW Regeneration Wales Adfywio Cymru.
- Friedmann, J. (1992). *Empowermnet: The Politics of Alternative Development*. New York: Blackwell.
- Gabrielian, V. (1999). Qualitative Research Methods: An Overview. Dalam G. J. Miller, & L. M. Whicker, *Handbook of Research Method in Public Administration* (hal. 184). New York: Marcel Dekker, Inc.
- Linden, R. M. (2002). *Working across boundaries*. San Francisco: John Wiley & Sons.
- Lommerse, M. (2011). Chapter 2 Working Together: Interior Architecture creating with the community. Dalam M. L. D. Smith, *Life from the Inside: Perspectives on Social Sustainability and Interior Architecture* (hal. 24-57). Perth, Australia: Paper and Pencil.
- Prasetyo, P. S., Rachmawati, T., Gunawan, T., Herwanto, T. S., & Wicaksono, K. W. (2017). *Inovasi untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.

- Shaw, M., & Crowther, J. (2017). *Community Engagement: A Critical Guide for Practitioners*.
- Smith, D., Sarah, B., Marina, L., & Metcalfe, P. (2014). An Introduction to Social Sustainability and Interior Architecture. Dalam D. Smith, M. Lommerse, & P. Metcalfe, *Perspectives on Social Sustainability and Interior Architecture* (hal. 1-11). Singapore: Springer.
- Soto, H. d. (1989). *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*. London: I. B. Tauris & Co. Ltd.
- Walker, M. A. (2014). *Communiitty Engagement*. Virginia: Virginia Cooperative Extension.
- World Health Organization. (2012). *Community Engagement*. Switzerland: World Health Organization.